



BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2011

Yang terhormat, Saudara Ketua, Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD;

Yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati, Rekan-rekan Kemuspidaan, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;

Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo;

Rekan-rekan pers, serta hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu; Warga masyarakat Wonosobo pendengar siaran radio Pesona FM di manapun berada.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Pertama-tama, marilah kita awali bersama pertemuan pada hari ini dengan memanjatkan do'a dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, kita bisa mengemban tanggungjawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Amin ya robbal 'alamin.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2011 ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2011 yang telah kita setuju bersama dalam Perda

Penetapan APBD dan Perubahan APBD. Penyampaian LKPJ ini sudah kami awali dengan penyampaian surat bernomor 130/078 tertanggal 19 Maret 2012 perihal dokumen LKPJ beserta lampirannya, serta permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundangan, saya akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan. Sebagai catatan, Dokumen LKPJ tahun 2011 terdiri dari dua bagian, yaitu:

Pertama, Buku LKPJ, yang memuat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui **Desentralisasi**, ditambah penyelenggaraan **Tugas Pembantuan** serta **Tugas Umum Pemerintahan**. Pada buku LKPJ ini, dipaparkan program, kegiatan dan realisasi APBD Tahun 2011 meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemaparan pada setiap urusan menjelaskan pokok-pokok capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2011, ditambah indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) serta standar pelayanan minimal bagi urusan yang sudah ditetapkan SPM-nya seperti Urusan pendidikan dan kesehatan. Tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan yang kita berikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kedua, adalah lampiran berisi data atau tabel kegiatan APBD berdasarkan urusan pemerintahan. Tabel ini merupakan kompilasi atau data olahan dari APBD 2011, yang dikelompokkan berdasarkan substansi kegiatan ke dalam 34 urusan pemerintahan. Tabel ini merupakan alat bantu untuk mengidentifikasi kegiatan di APBD berdasarkan SKPD pelaksana, berapa jumlah anggaran dan realisasinya, serta deskripsi ringkas kegiatan tersebut.

Dokumen tersebut, beserta sambutan pengantar yang sedang saya bacakan ini, merupakan dokumen yang akan dipakai dalam pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna/Komisi DPRD bersama jajaran pemkab, sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan mengantarkan APBD kita tahun 2011. Berdasarkan Perda Penetapan dan Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011, Pendapatan Tahun Anggaran 2011 setelah Perubahan adalah sebesar Rp 963.388.994.066,00 dan terealisasi sebesar Rp 979.683.002.107,00 atau mencapai 101,69 % dari rencana.

Sedangkan pada sisi belanja, Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 setelah Perubahan sebesar Rp 1.014.666.738.473,00 dapat direalisasi Rp 888.438.419.143,00 atau 87,56%. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasional dan Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 812.170.839.183,00 dapat direalisasi sebesar Rp 767.806.178.165,00 atau 94,54%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 201.495.899.290,00 dapat direalisasi sebesar Rp 119.760.572.978,00 atau 59,44%, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 871.668.000,00 atau 87,17%.

Anggaran belanja tersebut didistribusikan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Apabila dipahami bahwa pelaksanaan APBD adalah kelanjutan dari proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka belanja APBD tersebut telah kita gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 sesuai prioritas yang kita tetapkan. Pada konteks ini, perlu saya sampaikan bahwa meskipun tahun 2011 adalah awal periode kepemimpinan berdasarkan RPJMD 2010-2015, tetapi RKPD 2011 masih berpedoman pada RPJMD 2006-2010 sesuai penjelasan pasal 40 ayat (2) huruf j PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di mana pada masa transisi untuk menghindari kekosongan pada masa peralihan periode masa kepemimpinan Kepala Daerah, untuk penyusunan RKPD Tahun 2011 masih berpedoman pada RPJM periode sebelumnya.

Dari RKPD tahun 2011 tersebut, ada 5 prioritas yaitu:

1. penanganan kemiskinan melalui penanganan urusan dasar kesehatan, pendidikan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha ;
2. pengembangan ekonomi rakyat;
3. pengembangan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan rakyat;
4. pengembangan wilayah; dan
5. penyelenggaraan pemerintahan secara efektif.

Kelima prioritas tersebut, yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan berbagai urusan pemerintahan, telah diupayakan untuk bisa tercapai melalui APBD Kabupaten tahun 2011, juga melalui berbagai dana stimulan dan insentif pemerintah pusat serta tugas pembantuan dari APBN dan APBD Provinsi. Dalam prakteknya, pelaksanaan program dan kegiatan melalui APBD Kabupaten Tahun 2011 juga telah memperhatikan beberapa substansi rekomendasi DPRD dalam pembahasan LKPJ tahun sebelumnya.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada prioritas penanganan kemiskinan melalui pelayanan dasar publik, khususnya aspek pembangunan pada **URUSAN PENDIDIKAN**, selaras dengan komitmen kita untuk terus memberikan dukungan minimal 20% dari belanja APBD, tahun 2011 kita memprioritaskan pemerataan dan akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, yang didukung oleh meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatnya tata kelola pelayanan pendidikan. Penyediaan layanan pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, dan operasional sekolah terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Melalui APBD Kabupaten pada urusan pendidikan telah terealisasi anggaran sebesar Rp 433.082.095.752,00 atau 47,12 % dari total APBD Kabupaten Tahun 2011. Dana tersebut digunakan untuk gaji guru dan karyawan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai SLTA, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pendidikan luar sekolah.

Upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 6,34 tahun, naik 0,07 tahun jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 6,27 tahun, menurunnya proporsi penduduk yang buta aksara menjadi sebesar 8,74 %, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan.

APK SD/MI/ sederajat mencapai 105,67 %, dan APK SMP/MTs/ Sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, masing-masing telah mencapai 87,71 % dan 47,38 %. APM SD/MI/ sederajat mencapai 92,07 %, dan APM SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, masing-masing telah mencapai 56,02% dan 31,59%.

Berbagai upaya pemerintah dari tahun ke tahun juga telah berhasil menurunkan angka putus sekolah sebagai indikasi meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI menjadi sebesar 0,10 %, SMP menjadi sebesar 0,87 % dan SMA/MA menjadi sebesar 0,90 %. Peningkatan taraf pendidikan tersebut diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Peningkatan kualitas ditandai, antara lain, dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan,

kualifikasi guru juga terus ditingkatkan dan tahun 2011 angka persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 (layak mengajar) tercatat sebesar 48,74 %.

Kondisi sarana pendidikan pada akhir tahun 2011 dapat disajikan sebagai berikut : kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 2.616 ruang (68,70 %) rusak ringan sebanyak 696 ruang (18,28 %) dan rusak berat sebanyak 496 ruang (13,03 %) ruang kelas. Untuk tingkat SMP/MTs kondisi baik 865 ruang (81,60 %) kondisi rusak ringan 144 ruang (13,58 %) dan rusak berat 51 buah (4,81 %) ruang kelas dan tingkat SMA/SMK/MA kondisi baik 422 ruang (90,36 %) kondisi rusak ringan 13 ruang (7,07 %) dan rusak berat 12 ruang (2,57 %).

Untuk itu, mohon dukungan Dewan agar perbaikan sarpras pendidikan ini tetap menjadi salah satu prioritas bagi APBD kita.

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat juga erat kaitannya dengan pertumbuhan minat baca serta penyediaan buku serta informasi bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, untuk meningkatkan taraf kecerdasan masyarakat, terus dilakukan upaya perbaikan layanan dan kualitas perpustakaan daerah. Tahun 2011, dengan dana APBD yang berasal dari bantuan Provinsi, Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo melakukan pembenahan fisik, dan diharapkan menjadi perpustakaan yang nyaman dan aman serta menyenangkan bagi masyarakat baik yang belajar maupun yang hanya sekedar rekreasi bersama keluarga. Selain dipakai untuk pembangunan gedung, anggaran di **URUSAN PERPUSTAKAAN** dengan jumlah total Rp 8.339.770.074,00 juga antara lain untuk penambahan koleksi buku/bahan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan penyelenggaraan berbagai lomba kreatif anak dan guru PAUD, Rumah Belajar/Sanggar Belajar, serta pembinaan pada perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan maupun perpustakaan pondok pesantren serta rumah ibadah. Pembinaan ini dilakukan melalui kunjungan rutin dan berkala ke perpustakaan maupun melalui penyelenggaraan lomba perpustakaan.

Berbagai program di bidang perpustakaan tersebut secara positif telah menunjukkan hasil, antara lain meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah yang mampu dipertahankan rata-rata pertahun sejumlah 500.000 pengunjung, walaupun gedung perpustakaan pada saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan prioritas penanganan kemiskinan melalui pelayanan pada **URUSAN KESEHATAN**, dengan belanja sejumlah Rp 85.613.908.679,00 telah dilakukan berbagai program dan kegiatan di antaranya pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar; peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan; penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pola hidup sehat; pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi masyarakat; pengembangan lingkungan sehat terutama di lingkungan pemukiman rawan penyakit, tempat-tempat umum dan institusi; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan surveillance epidemiologi dengan memanfaatkan SIMPUS di masing-masing Puskesmas dan mengembangkan layanan SMS center sebagai sistem real time dalam melaporkan wabah kejadian luar biasa. Kesehatan lansia juga terus diupayakan melalui pembinaan terhadap 30 petugas Posyandu Lansia serta pemberian 43 unit posyandu kit.

Dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan tersebut pembangunan urusan kesehatan pada tahun 2011 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 13,23 (per mil kelahiran hidup), meningkatnya Angka harapan hidup menjadi 70,23 tahun, menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi 6,90%, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat menjadi 100%, cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh nakes meningkat menjadi 98,13%, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) meningkat menjadi 96,23%, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan penyakit TBC BTA 100%, cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 100,92%.

Di sisi lain, kita masih dihadapkan pada tantangan ke depan yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perubahan iklim dan gaya hidup yang memungkinkan penularan berbagai macam penyakit, serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan, sehingga seluruh jajaran kesehatan harus tetap bersiap siaga dalam mengabdikan dirinya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk dalam hal ini, adalah perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berpengaruh banyak terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Relevan dengan pemikiran tersebut, Pemkab tetap konsisten melaksanakan pembangunan pada **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**, dengan total belanja sejumlah Rp 4.055.556.067,00 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan baik itu di TPS-TPS di kawasan perkotaan RIK maupun di TPA Wonorejo. Oleh karena itu, tercapai peningkatan sampah yang tertangani periode 2010 dari 88,09% menjadi 95,12% pada tahun 2011 untuk wilayah perkotaan Wonosobo. Pada tahun mendatang, harapannya jangkauan pelayanan dapat meluas hingga ke seluruh wilayah kabupaten, dengan dukungan pengolahan sampah mandiri masyarakat. Program lainnya yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain lewat penyusunan buku inventarisasi dan/atau status lingkungan hidup daerah, juga pengadaan bibit tanaman, alat *composting* sampah, sumur resapan, dan lain sebagainya. Di samping itu, terkait penanganan isu kerusakan lahan di kawasan Dieng, melalui Program Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kawasan Dieng, yang mendorong sinergi pengelolaan lahan secara ramah lingkungan, pertanian terpadu, dengan penguatan ekonomi produktif serta upaya mendorong desa model konservasi.

Selanjutnya, sesuai prioritas RKPD dalam percepatan infrastruktur, pada **URUSAN PEKERJAAN UMUM**, Pemkab terus mengalokasikan anggaran dengan jumlah besar untuk menyediakan infrastruktur yang memadai sebagai wujud pemenuhan hak dasar rakyat. Total realisasi anggaran urusan pekerjaan umum berjumlah **Rp 118.506.467.097,00** untuk membiayai 8 program substantif pekerjaan umum meliputi program pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan yang terakhir adalah program pembangunan infrastruktur perdesaaan.

Perhatian Pemkab untuk kegiatan fisik pekerjaan umum memang besar, karena kita memahami bahwa infrastruktur sangat strategis sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2011 ini, perkembangan penanganan infrastruktur strategis telah mencapai titik yang menggembirakan. Terlepas dari permasalahan teknis lapangan yang menyisakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penyempurnaan fisik, kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sempol-Sigaluh telah memberikan warna baru penanganan infrastruktur melalui Kemitraan G to G

(Government to Government). Penanganan bersama Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sempol-Sigaluh antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara nomor 06/KB/VIII/2011 dan 050/KB/VI/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Pembangunan jembatan tersebut merupakan pembangunan jembatan pada ruas jalan alternatif yang mempunyai fungsi sebagai prioritas penanganan sebagai pendukung ruas jalan wilayah berbatasan antar kabupaten, diharapkan dampak jangka panjangnya dapat mempermudah akses distribusi hasil pertanian dan perkebunan, khususnya di pertumbuhan wilayah Agropolitan Rojonoto.

Selanjutnya, pada **URUSAN PENATAAN RUANG**, selaras RPJMD 2011- 2015 bahwa fokus isu penataan ruang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo, maka tahun 2011, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 254.131.200 yang antara lain diimplementasikan dalam Fasilitas Penyusunan RTRW dan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTRK). upaya ini telah berhasil menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 dan tujuh Rencana Detil Tata Ruang (Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Kejajar) yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, serta pembahasan dua raperda RDTR yaitu RDTR Kecamatan Mojotengah dan RDTR kecamatan Kertek.

Memang, persoalan tata ruang khususnya yang terkait dengan penduduk tidaklah sederhana, tetapi kita harus tetap berkomitmen untuk mensinergikan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang, sebagai upaya auch untuk implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada **URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**, sesuai semangat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kita terus mengupayakan agar mekanisme perencanaan pembangunan ke depan lebih mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab menganggarkan Rp 4.000.336.524,00 untuk mendukung pelaksanaan 10 program substantif pada urusan ini, baik yang berupa perencanaan dalam siklus rutin maupun perencanaan tematik pada berbagai bidang. Pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada kesempatan ini, saya mengajak komitmen kita semua untuk tetap konsisten dengan Musrenbang dan forum SKPD dalam siklus perencanaan, karena itulah mekanisme yg sudah kita sepakati bersama untuk memadukan perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif. Mudah-mudahan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, akan lebih terwujud praktek pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Pada **URUSAN PERUMAHAN**, pelaksanaan program utama di bidang ini yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan dan kegiatan terkait Urusan Perumahan diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan dengan sasaran peningkatan cakupan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Namun demikian, kita menyadari bahwa anggaran kita sejumlah Rp 1.790.623.450,00 terlalu kecil untuk bisa mendukung tujuan tersebut. Beruntung, kita memperoleh dana alokasi khusus pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, juga bantuan Provinsi untuk sarpras lingkungan permukiman.

Relevan dengan hal tersebut, salah satu inisiatif untuk memperbesar sumberdana alternatif di bidang perumahan, telah ditempuh dengan Pembentukan Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur Berkelanjutan pada tanggal 24 Juni 2011. Forum kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta pihak luar sehingga akan meningkatkan kapasitas penanganan terhadap indikator capaian Urusan Perumahan, di antaranya pemugaran rumah tidak layak huni, pembangunan sarana air bersih, penanganan sampah dalam skala lingkungan dan pembangunan sanitasi komunal sebagai usaha peningkatan kesehatan lingkungan permukiman. Pada tahun 2011 juga dilaksanakan kemitraan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Tirta Investama dan *channeling* dengan Program PNPM Mandiri Perkotaan untuk melaksanakan replikasi program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, penerapan strategi kemitraan ini telah mendapat apresiasi yang sangat baik dari pemerintah pusat melalui penghargaan sebagai Pemenang Anugerah Indonesia MDG's Award 2011 untuk Kategori Air Minum Layak dan Sanitasi Dasar dari Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDG's. Untuk itu, upaya kemitraan baik antar pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan

pemerintah maupun strategi perluasan channeling program akan terus dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan capaian indikatif Urusan Perumahan.

Selanjutnya, pada **URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**, melalui APBD telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 460.000.000,00, yang digunakan untuk pembinaan berbagai cabang olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi. Pada tahun 2011 juga diselenggarakan Pekan Olahraga Daerah Pelajar untuk penjarangan atlet berprestasi baik tingkat SD, SLTP dan SLTA serta Kejurda Olahraga Pelajar. Disamping itu untuk pembinaan dan penghargaan kepada atlet berprestasi telah disalurkan bantuan untuk atlet berprestasi sebanyak 30 atlet berprestasi dan bantuan olah raga masyarakat yang diberikan kepada 250 klub/kelompok olahraga.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Selama tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai event olahraga baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional, dengan prestasi yang diraih antara lain perolehan 14 emas, 13 perak dan 24 perunggu di Porda Kedu, Pekalongan dan Banyumas.

Di sisi lain, untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda, upaya pelayanan kepemudaan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti dialog pemuda, pelatihan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimpinian dan kepeloporan serta kegiatan lain dalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnya, pada **URUSAN PENANAMAN MODAL**, kita sadar bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah tetapi juga harus bisa mendorong investasi pihak swasta. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, Kabupaten Wonosobo terus berupaya mendorong masuknya investasi dan relevan dengan hal tersebut berbagai cara terus dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif termasuk pada aspek kelembagaan, deregulasi dan debirokratisasi. Pada tahun 2011 anggaran untuk penanaman modal berjumlah Rp 208.755.000,00, dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa promosi investasi baik skala lokal maupun regional dengan harapan mempromosikan produk UMKM kepada pembeli (*buyer*) sehingga bisa membuka berbagai peluang pasar baru.

Di sisi lain kita harus waspada, karena ada penurunan PMDN sebesar 0,81% pada tahun 2011, yang kemungkinan terjadi karena pengusaha dalam negeri mengetahui kondisi riil, resiko bisnis dan suku bunga yang lebih tinggi dari asing sedangkan bisnis yang digeluti tidak spesifik sehingga untuk prospek jangka panjang kurang bagus. Atau pengusaha lokal masih menahan keinginannya mengembangkan atau membuka bisnis baru dengan terlebih dahulu melihat peluang pasarnya. Di samping itu pada waktu tersebut sedang menjamur adanya investasi money game yang kurang bertanggungjawab. Oleh karena itu pemerintah Daerah harus lebih selektif terhadap usaha-usaha yang akan berkembang di Wonosobo serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman.

Relevan dengan itu, pada **URUSAN KOPERASI DAN UKM**, melalui berbagai program, Pemkab terus berupaya melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja koperasi dan usaha kecil menengah. Kita telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.040.678.546,00 pada berbagai program, antara lain program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. Dari berbagai program tersebut, sampai tahun 2011 perkembangan koperasi di Kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 330 unit, dengan rincian kategori 189 koperasi aktif dan 141 koperasi pasif, sedangkan jumlah UMKM meningkat 2,13%, di mana tahun 2011 tercatat 55.919 unit.

Pengembangan koperasi dan UMKM ini juga relevan dengan prioritas pembangunan tahun 2011 dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang pro poor, pro growth dan pro job. Sehingga diharapkan melalui pengembangan koperasi dan UMKM akan meningkatkan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Wonosobo.

Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya, sebagai implementasi dari pelayanan terhadap hak sipil masyarakat, pada **URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**, telah dilakukan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selaras dengan rencana kerja pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berkomitmen melaksanakan program penataan

administrasi kependudukan melalui kegiatan Peningkatan pelayanan bidang pencatatan sipil, Sosialisasi KTP Elektronik(E-KTP), pemeliharaan jaringan online dan sistem sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), serta penyegaran operator KTP dan Pembantu Bendahara Penerima KTP di Kecamatan. Untuk terlaksananya program dan kegiatan tersebut telah direalisasi anggaran sebesar Rp 2.765.476.043,00.

Masih relevan dengan persoalan demografi, pada **URUSAN KETENAGAKERJAAN**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.953.410.065,00 yang sebagian besar dialokasikan untuk untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Memang kita menyadari bahwa angka pengangguran masih cukup tinggi, dan kita harus tetap mencari jalan untuk memperbesar peluang kerja bagi saudara-saudara kita yang belum beruntung, melalui sinergi dengan berbagai sektor yang terkait.

Hadirin yang saya muliakan, pada **URUSAN KETAHANAN PANGAN**, kita telah menganggarkan Rp 6.519.849.408,00 untuk mendukung berbagai program diversifikasi pangan, pemberian bantuan alat pengolah pangan, lomba cipta menu pangan lokal, pengembangan tanaman hias dan tanaman pisang, pelatihan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pelatihan Pola Pangan Harapan (PPH), serta dengan melaksanakan survei produktivitas untuk memperoleh data produksi dan produktivitas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang, kobis, tomat dan cabe besar.

Aspek ketersediaan dan distribusi pangan dijabarkan juga dalam kegiatan berupa usaha pengembangan cadangan pangan daerah, penyusunan peta daerah rawan pangan, pengembangan desa mandiri pangan, pembuatan lumbung pangan, demplot jagung komposit, serta fasilitasi sarana prasarana yang mendukung meningkatnya produktivitas pertanian dengan rehabilitasi 35 unit jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tingkat usaha tani sebanyak 16 unit, pembangunan 10 unit jalan usaha tani, pembangunan gedung LKM penguatan usaha agribisnis pertanian, bantuan traktor 14 unit, bantuan alat pengolah pupuk organik 2 paket serta pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Hadirin yang saya muliakan,

Perhatian terhadap pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak telah menjadi komitmen kita sekalian sejak dekade lalu. Sebagai wujud keberpihakan Pemkab dalam **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**, tahun 2011 Pemkab menyediakan dana sejumlah Rp 566.495.861,00 untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak dengan melakukan sosialisasi, fasilitasi, pelatihan, pendampingan maupun bintek PUG; perlindungan terhadap perempuan dan anak terus diupayakan melalui kampanye, pendampingan korban KDRT serta optimalisasi gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB), peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui gerakan PKK dan program terpadu pemberdayaan masyarakat berperspektif gender (P2MBG).

Beberapa capaian dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 98,13%, serta dalam kaitan dengan hak atas identitas anak, pada tahun 2011 sebanyak 256.415 anak telah memiliki akte kelahiran.

Capaian kinerja dalam beberapa hal tersebut menunjukkan perbaikan, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ke depan, diantaranya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Untuk itu penguatan kelembagaan dan perlindungan anak, pengintegrasian program dan kebijakan responsif gender dalam seluruh bidang pembangunan serta dukungan dan kepedulian masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Masih relevan dengan pemberdayaan perempuan, pada **URUSAN KELUARGA BERENCANA**, pada tahun 2011 Pemkab melalui dana sebesar Rp 6.400.005.277,00 telah melakukan pengumpulan data keluarga di 265 desa, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB melalui penambahan berbagai alat sarpras KB, serta optimalisasi kegiatan pendukung pencapaian peserta KB. Selain itu, beberapa program pembinaan terkait pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, program pemberdayaan keluarga dengan melakukan kegiatan pelatihan panca bina keluarga, pembinaan UPPKS, pelatihan bagi 269 PPKBD dan pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak) sebanyak 1966 lembar.

Data statistik KB, prosentase keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 1, 39% dari 47,58% pada tahun 2010 menjadi 46, 19% pada tahun 2011,

menurunkan angka kelahiran total TFR (*Total Fertility Rate*) sebesar 0,09% dari 2,35% pada tahun 2010 menjadi 2,26% pada tahun 2011. Untuk itu ke depan diperlukan upaya optimalisasi akses, kualitas pelayanan dan pengelolaan program KB, meningkatkan pelayanan kontrasepsi yang tepat sasaran serta perlunya dukungan dari semua pihak dalam rangka menggalakkan kembali dan memasyarakatkan program KB.

Selanjutnya, pada **URUSAN PERHUBUNGAN**, realisasi anggaran sebesar Rp 13.559.052.600,00 difokuskan pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang terwujud pada kegiatan pembangunan guard drill pada ruas jalan yang rawan kecelakaan karena kendala topografi. Penanganan urusan perhubungan juga erat dengan prasarana urusan pekerjaan umum yaitu prasarana jalan. Kondisi fisik jalan yang ada juga berpengaruh pada pengembangan sarana perhubungan. Fenomena bertambahnya secara masif jumlah kendaraan roda dua juga nantinya akan berpengaruh pada layanan transportasi publik dan aspek-aspek terkait seperti perparkiran, penataan rute dan trayek, serta antisipasi kecelakaan lalu-lintas. Ini merupakan agenda yang harus tetap diperhatikan Pemkab, agar kita bisa menata manajemen perhubungan dan lalu-lintas di Wonosobo secara lebih baik.

Selanjutnya, pada **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, realisasi anggaran urusan kominfo sebesar Rp 189.232.400,00 yang diimplementasikan pada program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa bagi masyarakat, serta program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. Pada konteks ini, apabila kita melihat dari indikator EKPPD dari Pusat, maka capaian indikator kita sudah memenuhi target yaitu adanya website resmi Pemkab serta penyelenggaraan ekspose dalam rangka Hari Jadi Wonosobo. Namun, apabila urusan komunikasi dan informatika tentu tidak hanya relevan dengan indikator tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemkab Wonosobo, saya memberikan apresiasi kepada Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo yang beberapa waktu lalu mengundang jajaran SKPD terkait untuk dengar pendapat tentang rencana ke depan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan forum tersebut bisa merevitalisasi inisiatif TIK, dan dengan komitmen dukungan Dewan, saya optimistis program Electronic Government sesuai dengan Blueprint Pendayagunaan TIK Wonosobo akan segera terwujud, untuk mendukung implementasi Reformasi Birokrasi.

Hadirin yang saya muliakan,

Selanjutnya, untuk **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**, kita menyadari tujuan bersama membangun sistem politik yang demokratis, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi masyarakat dan menciptakan situasi dan kondisi aman, nyaman, tentram dan tertib. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada Tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Upaya dalam berbagai program kegiatan Kesbangpoldagri tersebut merupakan komitmen para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah serta Wonosobo yang Lebih Maju dan Sejahtera. Untuk itu Pemkab telah merealisasikan anggaran sejumlah Rp 6.158.688.563,00 antara lain untuk melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan wawasan kebangsaan, penciptaan kamtibmas serta perlindungan masyarakat termasuk dalam kondisi pasca bencana.

Selanjutnya, pada urusan **OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM**, yang merupakan simpul dari fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 136.805.914.499,00, meliputi 17 program dari aspek keuangan, administrasi pemerintahan, pengembangan kapasitas dan pengadaan sarpras aparatur, pengawasan, kepegawaian.

Dalam sisi penetapan regulasi Daerah, selama tahun 2011 telah ditetapkan 11 Perda termasuk 3 perda tentang keuangan, dan tidak ada satupun yang dibatalkan oleh Pemerintah. Tahun 2011 juga merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015, di mana kita memulai salah satu prioritas dalam RPJM yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk memfungsikan birokrasi secara tepat.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan seperti assessment terhadap analisis beban kerja organisasi perangkat daerah (OPD), merupakan basis untuk melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi menuju refungsionalisasi birokrasi secara tepat, meliputi baik postur, fungsi dan kinerja kelembagaan yang ideal (*right-sized*). Konteks ini selaras dengan upaya mendorong kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan sistem, prosedur dan mekanisme kerja internal dan antar OPD. Terkait dengan ini, penting untuk

tetap melakukan penyegaran dan intervensi yang tepat pada empat pilar utama yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur serta sistem pengawasan.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah termasuk perangkat desa juga diberikan, tanpa mengurangi hak masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan pada sisi tata kelola keuangan dan pengawasan, terus diupayakan optimalisasi pemeriksaan, meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.

Terkait dengan pengelolaan keuangan sebagai salah satu aspek dari pengembangan kapasitas otonomi daerah, yang di dalamnya termasuk penanganan aset pemerintah, kita menyadari bahwa kinerja keuangan ini perlu terus menerus disempurnakan. Dalam upaya penatausahaan aset daerah, melalui belanja sebesar Rp 828.580.565,00 pada **URUSAN PERTANAHAN**, kita terus berupaya melakukan penertiban dan penatausahaan aset tanah milik pemerintah daerah termasuk di dalamnya eks tanah bengkok dan eks instansi vertikal. Upaya ini penting karena merupakan salah satu point penting catatan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan predikat audit menjadi “wajar tanpa syarat” dalam konteks manajemen aset daerah Pemkab Wonosobo. Ini memang membutuhkan waktu dan juga kerja keras, karena membutuhkan sinkronisasi data dengan berbagai instansi.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam bidang **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**, prinsip pemberdayaan terus kita kedepankan untuk diimplementasikan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2011, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.339.117.517,00 telah dilakukan berbagai program untuk peningkatan keberdayaan masyarakat. Sedangkan pada aspek dana perimbangan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27.000.000.000,00, melebihi ketentuan minimal sesuai PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebutkan ADD diperoleh dari perhitungan 10 % dari jumlah dana alokasi umum dikurangi belanja pegawai ditambah pajak penghasilan asli daerah, bagi hasil PBB dan bagi hasil pajak provinsi. Dukungan dana ini tentu saja diharapkan bisa mendorong efektifitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa. Program lain yang tidak kalah strategisnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan ekonomi perdesaan (PER), yang diarahkan untuk

menumbuhkembangkan kembali ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala kecil dan menengah.

Di luar itu, masih banyak sebenarnya program pemberdayaan masyarakat yang kita kembangkan, antara lain yang menyangkut PNPM, baik perkotaan maupun perdesaan, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam pendampingan PNPM, sosialisasi Petunjuk teknis operasional PNMP, rapat-rapat dan fasilitasi permasalahan serta untuk bantuan kepada badan kerjasama antar desa. Manfaat dari berbagai kegiatan tersebut adalah terciptanya proses dan mekanisme PNPM Mandiri sesuai dengan aturan melalui bentuk-bentuk pembinaan, monitoring, koordinasi, pengendalian serta pelaporan yang akuntabel. Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat ini akan terus kita kembangkan, antara lain melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat di berbagai level serta domain yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dari aspek permasalahan sosial yang masih dihadapi kabupaten Wonosobo. Kita menyadari bahwa perlindungan dan kesejahteraan sosial diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Agenda penting kita adalah penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), karena masih banyak saudara kita yang masih harus mendapat perhatian, antara lain belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Terhadap persoalan ini, pada **URUSAN SOSIAL** telah kita belanjakan dana APBD sejumlah Rp 5.034.464.220,00, yang sebagian besar dialokasikan untuk pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta *assessment* terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), peningkatan pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan kesejahteraan sosial, serta berbagai program pembinaan PMKS dan bantuan hibah. Ke depan, agenda yang perlu menjadi perhatian bersama adalah peningkatan pelayanan/rehabilitasi sosial bagi PMKS, penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Selain itu, perlu dibangun kemitraan dengan pengusaha/korporasi untuk penanganan masalah PMKS melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) serta terus menerus melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS.

Pada **URUSAN KEBUDAYAAN**, pemerintah kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 190.950.000,00 yang antara lain digunakan untuk pentas Seni di TMMI Jakarta serta Pentas Wayang kulit di RRI Purwokerto sebagai wujud apresiasi terhadap seni budaya. Di samping itu, juga dilakukan inventarisasi dan dokumentasi benda cagar budaya, agar bisa diketahui kondisi dan keberadaannya.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pengembangan berbagai ragam obyek wisata termasuk yang bernuansa seni budaya relevan dengan pengembangan urusan Kepariwisata karena dalam konteks lokal Wonosobo, pariwisata erat kaitannya dengan seni dan budaya. Oleh karena itu, pada **URUSAN KEPARIWISATAAN**, dengan belanja sebesar Rp 3.322.027.134,00 sudah dilakukan berbagai program pengembangan potensi pariwisata dalam berbagai bentuk. Berdasarkan data statistik, tahun 2011 jumlah wisatawan meningkat menjadi 290.174 orang, naik dari angka 274.891 orang pada tahun 2010. Anggaran tersebut untuk mendukung upaya pelestarian nilai budaya, obyek wisata dan cagar budaya, kelestarian alam serta pemberdayaan masyarakat karena kita ingin mengembangkan secara serius pariwisata berbasis masyarakat, dan pada kawasan khusus dataran tinggi dieng perlu dikembangkan *agro-eco-culture tourism* yang mengkombinasikan wisata pertanian, lingkungan dan budaya dan minat khusus dalam berbagai bentuk.

Selanjutnya, pada **URUSAN STATISTIK**, kerjasama Pemkab dengan BPS dalam hal statistik Daerah Dalam Angka (DDA) dan PDRB yang telah terjalin, mudah-mudahan membantu terwujudnya sistem perencanaan berbasis data statistik, agar kegiatan yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran, terarah dan bermanfaat.

Pada **URUSAN KEARSIPAN** melalui alokasi APBD sebesar **Rp 897.949.434,00** dilakukan penyelamatan dan pelestarian arsip Dokumen/Arsip Daerah yang bernilai. Diharapkan, upaya ini bisa menyelamatkan dokumen arsip dinamis maupun statis yang penting sebagai data pendukung pemerintahan maupun arsip yang masih diperlukan untuk perencanaan ke depan.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Di samping 26 urusan wajib yang telah saya paparkan di atas, kita memiliki delapan 8 urusan pilihan yang pada hakekatnya mendukung pelaksanaan urusan wajib dan sesuai dengan konteks lokal atau karakteristik Wonosobo, antara lain adalah potensinya dalam bidang agrikultur. Relevan dengan hal tersebut, pada **URUSAN PERIKANAN**, kita terus mengembangkan perikanan

terutama pada bidang perikanan budidaya, dengan dana APBD sebesar Rp 6.177.975.671,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik BBI, UPR, pengembangan kawasan budidaya air tawar dan pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perkolaman rakyat (BLM). Dengan upaya-upaya tersebut dan atas peran aktif masyarakat, luas lahan perikanan mengalami peningkatan yaitu pada luas kolam air tenang dan Usaha Perbenihan Rakyat. Keadaan ini berbanding lurus dengan peningkatan volume produksi perikanan yaitu ikan konsumsi dan benih ikan. Seiring dengan peningkatan produksi, maka konsumsi ikan juga mengalami kenaikan dari 12,47 kg/kapita/tahun (2010) menjadi 12,86 kg/kapita/tahun (2011) atau mengalami kenaikan sebesar 0,39%. Tingkat konsumsi ikan bagi rata-rata penduduk Wonosobo harus terus ditingkatkan agar sebanding dengan tingkat konsumsi nasional sebesar 32 kg/kapita/tahun.

Keberhasilan pembangunan perikanan di Wonosobo tidak terlepas dari peran aktif seluruh SDM perikanan, para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan serta penyuluh perikanan. Untuk mencapai target produksi perikanan budidaya nasional sebesar 353%, dibutuhkan teknologi tinggi untuk mencapai hasil tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu antara lain meliputi: pemilihan lokasi budidaya yang tepat, pemilihan bibit kualitas unggul, swasembada pakan ikan, penanganan penyakit yang efektif, teknologi budidaya yang up to date hingga sampai kepada akses pasar.

Masih pada sektor agrikultur, pada **URUSAN PERTANIAN**, dengan dana APBD sebesar Rp 9.035.602.075,00 terus dilakukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat tani, pemberdayaan penyuluh, pengembangan agribisnis, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak serta peningkatan produksi hasil peternakan.

Memang produktivitas padi atau bahan pangan utama di tahun 2011 menurun sebesar 0,05% dibandingkan tahun 2010, yang diduga terjadi karena menurunnya produksi sebesar 7,38% dan menurunnya luas panen sebesar 6,53%. Luas panen berkurang karena adanya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lain secara signifikan. Sedangkan bila dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pada tahun 2011 mencapai 47,37%. Maka dari itu, untuk tetap meningkatkan produksi dan

produktifitas di tengah menyempitnya lahan pertanian, Pemkab mulai menekankan bahwa setiap komoditas pertanian yang hendak dijual baik di tingkat lokal maupun ekspor harus dalam bentuk barang jadi sehingga ada nilai tambah dari komoditas pertanian tersebut.

Selain itu dari sektor peternakan, pada tahun 2011 Domba Wonosobo yang merupakan plasma nutfah khas Wonosobo telah berhasil mendapatkan penetapan sebagai rumpun Domba Wonosobo (Dombos) melalui Surat Keputusan Menteri No. 2915/kpts/ot.14/06/2011. Kita memahami bahwa ternak lokal merupakan sumber genetik unik yang seharusnya dapat dimanfaatkan pengembangannya dan dijadikan sebagai sumber ketahanan pangan nasional. Untuk itu, perlu tetap kita lakukan konservasi terhadap plasma nutfah, untuk mengantisipasi ternak lokal yang mulai punah.

Masih relevan dengan pembahasan tentang agrikultur, pada **URUSAN KEHUTANAN**, agenda terbesar kita adalah penguatan pengelolaan hutan dan untuk menunjang pembangunan, di samping perhatian pada aspek konservasinya, mengingat wilayah hutan Wonosobo memiliki posisi yang sangat strategis bagi Jawa Tengah bagian selatan, karena Wonosobo adalah daerah hulu daerah aliran sungai besar yaitu Serayu, Tulis, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengalir 6 wilayah kabupaten. Tahun 2011, belanja urusan kehutanan berjumlah Rp 5.048.188.593,00, yang digunakan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, melalui serangkaian kegiatan RHL Kawasan Konservasi, Pemulihan Kawasan Dieng, Implementasi Hutan Kemasyarakatan, serta konservasi lahan kawasan Tembakau.

Selain itu, pada aspek kelembagaan juga dilakukan peningkatan peranserta dan ketrampilan masyarakat sekitar hutan meliputi 8 LMDH, rehabilitasi lahan dan hutan kawasan konservasi seluas 150 Ha, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi berupa 2 unit dam penahan sedimen dan 2 unit gullyplug, pengembangan dan pengembangan hutan rakyat seluas 400 Ha dan penghijauan lingkungan di 19 Desa di kawasan hulu DAS.

Selanjutnya, pada **URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**, Pemkab terus berupaya menyelesaikan persoalan beberapa kampung, dusun dan kelompok pemukiman penduduk yang belum dapat menikmati listrik. Tahun 2011, anggaran untuk sektor ini sebesar Rp 340.100.000,00 yang sebagian besar digunakan untuk pemeliharaan 2.300 titik lampu penerangan jalan. Terkait dengan ini, mohon dukungan terus menerus dari jajaran Dewan agar ke depan Pemkab bisa menyelesaikan problem lingkungan atau

kelompok permukiman yang belum berlistrik.

Selanjutnya, pada **URUSAN PERINDUSTRIAN**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.996.241.864,00, telah dilakukan program penataan struktur industri, berupa penataan data base dan struktur industri yang bertujuan mendorong terwujudnya struktur industri yang kokoh. Dengan adanya data base dan struktur industri, diharapkan akan terbangun klaster-klaster industri yang sehat dan kuat dengan jaringan industri pendukung dan sarana umum yang memadai, serta akan terbentuk struktur penguasaan pasar yang makin sehat dan kompetitif.

Melalui berbagai kegiatan pengembangan perindustrian tersebut, ada trend peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di mana tahun 2011 meningkat sebesar 1,30%, dan pertumbuhan industri naik 0,01% dibanding tahun 2010. Upaya pengembangan industri kecil dan menengah akan terus kita laksanakan sehingga rata-rata setiap tahun ada pertumbuhan unit usaha dan wirausaha industri. Demikian juga pengembangan sentra menjadi klaster industri sehingga akan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan, mengurangi biaya transportasi dan transaksi, meningkatkan efisiensi kolektif, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi.

URUSAN PERDAGANGAN, total belanja sejumlah Rp. 1.381.735.265,00, digunakan untuk pengembangan kualitas produk/SDM dan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengembangan infrastruktur perdagangan serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan 6,56% dibanding tahun 2010. Kontribusi tersebut harus tetap dipertahankan/ditingkatkan dengan cara meningkatkan nilai tambah produk-produk perdagangan dan memperbaiki kualitas fasilitas infrastruktur perdagangan, karena perdagangan sangat mengandalkan mobilitas yang tinggi.

Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dan segenap hadirin yang saya muliakan,

Demikian pengantar singkat laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2011, terutama dari sisi belanja per urusan pemerintahan. Selanjutnya, dokumen LKPJ ini akan dibahas dalam forum Komisi DPRD bersama SKPD terkait sesuai jadwal yang telah disepakati.

Sebagai catatan akhir dari pengantar ini, saya akan menyampaikan statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2011 sebagai berikut:

1. Angka Indeks Pembangunan Manusia : 70,96, meningkat dari angka tahun 2010 sebesar 70,52 dari tahun 2010
2. Angka harapan hidup sebesar 70,23, meningkat dari 69,98 pada tahun 2010
3. Angka melek huruf (1,26%, nemingkat dari 90,47 pada tahun 2010,
4. Paritas daya beli : Rp 631,84 ribu rupiah, bertambah dari angka 629,76 ribu pada tahun 2010.

Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh komponen masyarakat, Anggota DPRD, jajaran Kemuspidaan, serta perangkat Pemerintah Daerah dan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses pembangunan dan pemerintahan tahun 2011.

Kemitraan antar pihak yang telah terjalin tersebut, marilah terus menerus kita kembangkan, untuk mewujudkan Wonosobo yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Sekian dan terima kasih,

Wabilahittaufiq wal hidayah,

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF